



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DIPLOMASI INDONESIA MENGHADAPI BELEID DEFORESTASI UNI EROPA

Teddy Prasetiawan

Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Uni Eropa mengesahkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) 19 April lalu. Implikasi dari beleid, antara lain, Uni Eropa —yang beranggotakan 27 negara— akan membatasi 7 komoditas pertanian dan kehutanan yang berasal dari negara-negara yang melakukan deforestasi. Salah satu komoditas yang dimaksud adalah kelapa sawit. Melalui EUDR, Uni Eropa meminta eksportir membuktikan produk yang mereka ekspor bukan merupakan hasil dari deforestasi dan akan mengenakan denda besar atas pelanggaran yang terjadi. Menyikapi hal tersebut, Indonesia dan Malaysia —yang merupakan negara produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar dunia— berencana mengirimkan delegasi dalam *joint mission* ke markas Uni Eropa di Brussel, Belgia, pada 20-31 Mei 2023 untuk berdialog terkait EUDR yang dinilai diskriminatif dan tidak mempertimbangkan peran penting petani kecil dalam rantai pasok global.

Diplomasi soal EUDR sebelumnya telah dilakukan oleh wakil Indonesia pada berbagai tingkat pertemuan, baik tingkat menteri maupun tingkat kepala negara, antara lain, *pertama*, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, bersurat kepada 27 menteri perdagangan negara-negara anggota Uni Eropa serta Executive Vice President dan Commissioner for Trade Uni Eropa. *Kedua*, Kedutaan Besar Indonesia di Brussel menginisiasi *joint letter* yang ditandatangani oleh 14 negara yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa. *Ketiga*, delegasi Indonesia menyampaikan keberatan di berbagai forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan di Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). *Terakhir*, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan keberatan langsung kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, melalui pertemuan bilateral di sela-sela KTT G7 di Hiroshima, Jepang, 21 Mei lalu.

Joint mission ke Uni Eropa bertujuan untuk menyampaikan data yang berimbang tentang kondisi deforestasi yang terus mengalami penurunan menjadi 75% atau 115 ribu hektare dalam kurun waktu 2019--2020. Angka ini merupakan laju deforestasi terendah sejak tahun 1990. Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan *joint mission* tersebut untuk mengusulkan negaranya dalam kategori negara risiko rendah deforestasi. Selain itu, tidak semua perkebunan sawit Indonesia dapat diasosiasikan dengan deforestasi. Banyak di antaranya telah memenuhi standar perkebunan yang berkelanjutan, baik Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) maupun sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan milik Indonesia, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sangat tidak adil jika Uni Eropa memukul rata ketentuan EUDR untuk semua praktik perkebunan kelapa sawit atau bahkan untuk semua komoditas pertanian dan kehutanan asal Indonesia, hanya karena Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan deforestasi tinggi.

Ekspor CPO Indonesia selama 4 tahun terakhir memang terus merosot. Penurunan ini terjadi sebelum EUDR disahkan, yaitu melalui kebijakan Renewable Energy Directive yang membatasi penggunaan biofuel guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi. Sebanyak 44,8% produksi CPO Indonesia dikonsumsi dalam negeri pada tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pasar Uni Eropa hanya menyerap sekitar 2—3 juta ton per tahun saja. Jika Uni Eropa tetap memperbolehkan impor CPO dari Indonesia yang telah memenuhi RSPO atau ISPO

maka permintaan pasar Uni Eropa dengan mudah dapat dipenuhi. Sebagai informasi tambahan, produksi CPO Indonesia yang sudah memenuhi RSPO mencapai 5,76 juta ton per tahun dan yang sudah memenuhi ISPO mencapai 22 juta ton per tahun.

Meskipun pasar Eropa bukanlah pasar terbesar CPO Indonesia, namun perlu diwaspadai peluang menyebarnya kebijakan sejenis ke negara tujuan utama ekspor, mengingat isu sawit tidak sepenuhnya terkait deforestasi, tetapi juga persaingan dagang. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar pasar CPO terjaga kesinambungannya, antara lain dengan, *pertama*, meningkatkan konsumsi dalam negeri yang persen idealnya kisaran 60—75% dari total produksi sehingga ketergantungan terhadap pasar luar negeri menurun. *Kedua*, melakukan percepatan sertifikasi RSPO dan ISPO sebagai syarat memenuhi EUDR. *Ketiga*, lebih memperhatikan perkebunan kelapa sawit rakyat. Pemerintah perlu lebih serius membina petani sawit dan tidak hanya menggunakannya sebagai narasi diplomasi untuk menyelamatkan perkelapasawitan Indonesia di mata dunia.

Selain mengatasi permasalahan seputar sawit rakyat, seperti produktivitas yang rendah dan realisasi program peremajaan sawit rakyat yang pula rendah, pemerintah juga diharapkan dapat membantu petani sawit agar memenuhi standar EUDR, yaitu dengan, *pertama*, memfasilitasi penyelesaian legalitas sawit rakyat. *Kedua*, memfasilitasi proses sertifikasi bagi petani sawit. Dari total 6,7 juta hektare kebun sawit rakyat pada 2022, baru 32 sertifikat ISPO yang dikeluarkan untuk pekebun. *Ketiga*, segera menyelesaikan konflik perizinan perkebunan sawit dan mempercepat pengakuan hak masyarakat adat.

Atensi DPR

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berencana melakukan *joint mission* ke Uni Eropa buntut dari disahkannya EUDR yang akan berdampak pada perkelapasawitan Indonesia. Beleid itu dinilai diskriminatif dan tidak mempertimbangkan peran penting petani kecil dalam rantai pasok global. DPR RI perlu mendukung upaya pemerintah tersebut dengan turut menggunakan peran diplomasi parlemen di kancah internasional. Namun, Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan pemerintah agar lebih serius membenahi permasalahan perkebunan kelapa sawit rakyat dan memfasilitasi petani sawit agar dapat memenuhi persyaratan EUDR, salah satunya dengan memfasilitasi proses sertifikasi bagi petani sawit. Jangan sampai petani sawit hanya dijadikan narasi diplomasi bagi pemerintah untuk menaikkan citra sawit Indonesia di mata dunia.

Sumber

Bisnis Indonesia, 23, 25, dan 26 Mei 2023; dan
Tabloid Kontan, 29 Mei—4 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023